

# Faktor yang Berpengaruh dalam Penyediaan Taman Kota untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi

## *Factors Influencing Urban Park Provision for Sustainable Development in Bekasi City*

Hyldegard Asyera Malnes<sup>1\*</sup>, Soedwihjono<sup>1</sup>, Erma Fitria Rini<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*e-mail: [asyeramalnes@student.uns.ac.id](mailto:asyeramalnes@student.uns.ac.id)

(Submitted: 9 July 2024; Reviewed: 9 November 2024; Accepted: 16 November 2024)

### Abstrak

Fenomena perubahan lahan perkotaan menjadi lahan terbangun meningkat seiring dengan pemenuhan kebutuhan sektor perdagangan dan jasa. Taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan lahan terbuka yang memiliki manfaat dan fungsi ekologis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, penyediaan taman kota sebagai RTH merupakan sebuah tantangan utama pada kawasan perkotaan. Kota Bekasi merupakan kota yang letaknya strategis serta merupakan *hinterland* bagi Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan persentase lahan terbangun yang signifikan seiring dengan tingginya angka kepadatan penduduk di Kota Bekasi. Kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyediaan RTH publik di suatu wilayah. Pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, kebutuhan akan RTH semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan taman kota di Kota Bekasi sehingga menjadi dasar kajian dalam penyediaan RTH untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pada wilayah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis deskriptif dan analisis Delphi melalui kuesioner kepada stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat delapan faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan taman kota di Kota Bekasi yakni regulasi penyediaan RTH, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat beserta dengan lima faktor lainnya berkaitan dengan kinerja pemerintah serta kondisi iklim kawasan.

**Kata kunci:** analisis faktor; penyediaan Ruang Terbuka Hijau; Ruang Terbuka Hijau; taman kota

### Abstract

The phenomenon of converting urban land into built-up land has been increasing as the trade and service sectors meet their needs. City parks, as part of public green open spaces, are open areas that have benefits and ecological functions that support sustainable development. Therefore, providing city parks as green spaces is a major challenge in urban areas. Bekasi City is a strategically located city and serves as a hinterland for Jakarta. This has led to significant changes in land use, population growth, and the percentage of built-up land, along with high population density in Bekasi City. Population density has a significant impact on the provision of public green spaces in an area. In areas with high population density, the demand for green spaces increases. This study aims to determine factors that influence the provision of city parks in Bekasi City, serving as the basis for studying the provision of green open spaces to support sustainable development in the research area. The research method used in this study is descriptive analysis technique and Delphi analysis through questionnaires for stakeholders. Based on the results of the study, it is found that there are eight factors that influence the provision of city parks in Bekasi City. These factors include regulations for the provision of green open spaces, budget availability, community participation, coordination among stakeholders, government commitment, land availability, climate/weather, and the quality of human resources.

**Keywords:** factor analysis; green open space provision; green open space; urban park

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena perubahan lahan perkotaan menjadi lahan terbangun terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan untuk sektor jasa dan komersial. Perubahan ini dipercepat oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi penduduk di pusat-pusat aktivitas, aksesibilitas ke pusat perkotaan, dan jaringan transportasi yang menyediakan akses ke layanan

utama suatu wilayah (Cullingworth, 1997). Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia dalam penggunaan lahan, pengembangan lahan, dan pertumbuhan ekonomi telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan (Du & Huang, 2017). Salah satu tantangan utamanya adalah penurunan luasan ruang hijau di lingkungan perkotaan yang padat dengan penyusutan ruang hijau privat tanpa peningkatan yang memadai pada ruang hijau publik (Haaland & Bosch, 2015).

Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencakup area yang terbuka, didedikasikan untuk pertumbuhan tanaman baik secara ilmiah maupun yang ditanam secara sengaja, seperti yang diatur dalam pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2008 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditetapkan bahwa 30% dari total luas wilayah kota harus dialokasikan untuk RTH, dengan 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat. Hal ini bertujuan untuk menjaga ekosistem, tata air, iklim perkotaan, serta meningkatkan kualitas udara dan nilai estetika kota.

RTH publik tidak hanya memberikan manfaat ekologis, seperti mengurangi efek *Urban Heat Island* (UHI) dan meningkatkan kualitas udara, tetapi juga memberikan manfaat sosial dengan menyediakan ruang untuk rekreasi dan habitat bagi satwa liar (Andersson, 2016; Kaplan, 2019). Pada beberapa negara seperti Tiongkok, pengelolaan RTH telah menjadi indikator penting dalam perencanaan kota sejak tahun 1980an (Zhang *at al.*, 2021). Namun, distribusi dan aksesibilitas RTH publik tidak selalu merata sehingga menciptakan ketidakadilan lingkungan, seperti yang diamati di beberapa kota di Eropa dan Jerman (Wolff & Haase, 2019; Xu *at al.*, 2018). Taman kota adalah bagian penting dari RTH publik yang menyediakan ruang terbuka untuk kegiatan sosial, budaya, dan estetika, serta fungsi-fungsi lain, seperti mitigasi bencana, peningkatan ekonomi, dan resapan air.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 menetapkan Kota Bekasi sebagai bagian dari wilayah perkotaan dengan fokus pada pengembangan pusat pertumbuhan nasional dan regional di provinsi Jawa Barat (Sitorus *at al.*, 2012). Meskipun demikian, Kota Bekasi sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk yang cepat mengalami tantangan dalam memenuhi target 30% luas wilayah untuk RTH sebagaimana diatur dalam undang-undang. Persentase luasan RTH publik di Kota Bekasi baru mencapai 8,23% dari total luas wilayahnya.

Alih fungsi lahan menjadi masalah utama mengingat beberapa area RTH publik, seperti taman kota dan hutan kota, dikonversi menjadi area terbangun, kosong, atau pertanian (Sitorus *at al.*, 2012). Strategi untuk mencapai target RTH di Kota Bekasi meliputi pembelian lahan dari warga yang masih terhambat oleh keterbatasan dana dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya RTH (Cahya *at al.*, 2016). Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH publik, khususnya taman kota di Kota Bekasi. Studi ini diharapkan dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sesuai dengan visi RTRW Kota Bekasi untuk menjadi tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang didefinisikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memastikan kebutuhan generasi mendatang agar dapat menikmati kualitas hidup yang sama ataupun lebih baik (Buttin, 1989). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sebagai elemen vital dalam ekosistem perkotaan, RTH berkontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

RTH publik pada kawasan perkotaan merupakan lahan baik seluruhnya maupun sebagian yang ditutupi vegetasi (De Haas *at al.*, 2021) dan terbagi menjadi ruang publik dan privat yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia serta berperan dalam meningkatkan kelayakan sebuah kota, sehingga dalam penyediaannya perlu pendistribusian yang merata agar dapat mengakomodasi kebutuhan penduduk. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyebutkan bahwa fungsi RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, serta penanggulangan bencana. Dalam peraturan ini, RTH terbagi menjadi rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT, taman RW, dan pemakaman.

## **2.2 PENGERTIAN TAMAN KOTA**

Taman kota merupakan bagian penting dari RTH dalam ekosistem perkotaan dan lanskap kota (Mou *et al.*, 2023). Dalam ruang perkotaan, taman kota terdiri dari lahan terbuka yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kota atau kawasan perkotaan. Taman kota dalam memelihara lingkungan alami perkotaan dimanfaatkan melalui penanaman vegetasi yang menyesuaikan ekosistem eksisting lahan dengan kriteria luas paling kecil 50.000 m<sup>2</sup> juga proporsi berupa tutupan hijau 85% dan tutupan non hijau 15% serta radius pelayanan 5.000 m. Taman kota sebagai fungsi resapan air dimanfaatkan melalui penyediaan ruang terbuka biru serta memiliki kriteria minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap. Taman kota juga dikembangkan melalui tutupan nonhijau sebesar 15% dengan material ramah lingkungan untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana.

## **2.3 PERENCANAAN PENYEDIAAN TAMAN KOTA**

Imansari & Khadiyanta (2015) menjelaskan bahwa taman dan hutan kota sebagai RTH publik dalam aspek sosial budaya memiliki fungsi sebagai ruang komunikasi dan interaksi sosial bagi masyarakat. Agar suatu RTH publik dapat berfungsi secara optimal, perlu diperhatikan pemenuhan kriteria penyediaan sebagai ruang publik yang ideal, seperti keterjangkauan lokasi, kenyamanan, dan rasa aman bagi penggunaannya sehingga dalam hal ini penting untuk melihat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hutan dan taman kota. Sebagai contoh, pengelolaan taman kota sebagai RTH pada Kota Surabaya yang dilakukan oleh pemerintah kota yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya telah dilakukan semaksimal mungkin dengan melakukan pengelolaan taman dan penambahan ruang terbuka hijau di sekitar lahan-lahan kosong serta penyuluhan kepada masyarakat melalui musyawarah. Penelitian oleh Widyahantari & Rudiarto (2018) menunjukkan bahwa dalam penyediaan taman tematik guna mewujudkan kota layak huni, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya terutama dalam hal penyediaan anggaran dan sumber daya manusia. Namun, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama sehingga pembangunan taman diprioritaskan pada lahan yang telah tersedia. Selain itu, kolaborasi merupakan kunci utama dalam penyediaan kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Indikator utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja taman kota sebagai ruang hijau perkotaan yakni kekuatan pemerintah, kondisi masyarakat, serta pelaksanaan dan peraturan.

Lestari & Nur (2021) melakukan evaluasi kebijakan RTH di Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa evaluasi belum terlaksana dengan baik khususnya pada kriteria sumber daya aparatur, kurangnya sarana dan prasarana di beberapa taman kota, taman kota yang kurang terpelihara serta masih terkendala dalam hal finansial atau anggaran. Menurut Purwanti (2022), potensi taman kota yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga hanya beberapa masyarakat saja yang memperoleh manfaat dari keberadaan taman kota. Hal ini kemudian seharusnya menjadi pendorong untuk terjadi keseimbangan antara ketersediaan anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dikeluarkan untuk perawatan dan pembuatan taman agar dapat memaksimalkan fungsi taman kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup masyarakat kota yang lebih baik. Kemudian Dominggus *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat serta infrastruktur penanganan sampah dalam pengelolaan taman kota dan penanggulangan sampah di Kabupaten Bengkayang masih minimnya. Pengelolaan taman kota merupakan komitmen bersama seluruh komponen pemerintahan serta masyarakat. Dibutuhkan kerja sama semua pihak yang mana keterlibatan akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang kokoh dan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, maka akan dapat menciptakan lingkungan yang indah, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Penelitian oleh Rasyid & Purbaningrum (2024) menunjukkan bahwa masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan dan pengelolaan sehingga adanya bantuan dari masyarakat kepada pihak pengelola taman kota membuat segala fasilitas dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan taman kota menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan dan pelestarian taman agar sesuai dengan fungsi taman kota sebagai ruang aktivitas masyarakat kota dan menunjang kualitas lingkungan hidup perkotaan. Pengelolaan taman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pihak lain yakni pihak swasta dan pihak masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat, komunitas, dan organisasi dapat meningkatkan interaksi sosial sehingga dapat membangun hubungan baik antara pengelola dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan taman. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan dan pengelolaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman yang berada pada tingkat rendah dipengaruhi beberapa hal, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan taman akibat kurangnya kegiatan sosialisasi atau diskusi yang diadakan oleh pemerintah.

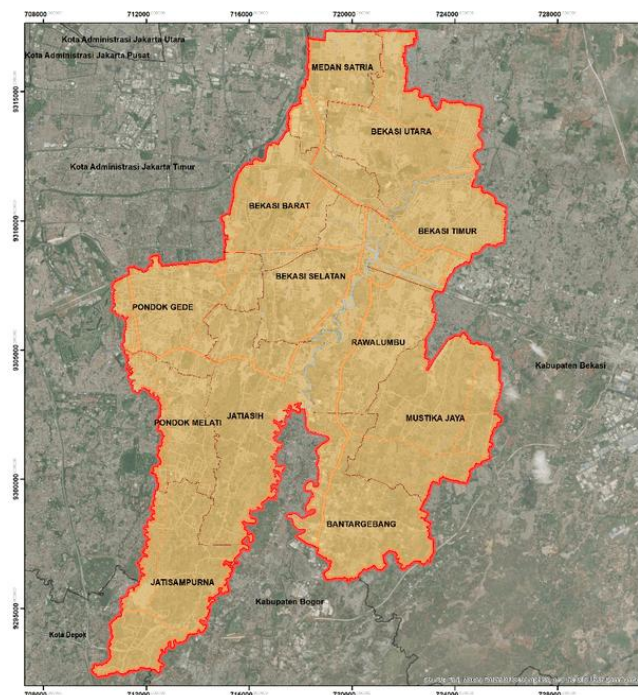
Dalam penentuan aspek penyediaan taman kota di Kota Bekasi, dilakukan sintesis dari teori-teori sebagai penyusunan variabel dalam penelitian, dan didapatkan variabel yang digunakan dalam penelitian yakni Regulasi Penyediaan RTH, Ketersediaan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan, Komitmen Pemerintah dan Ketersediaan Lahan. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

| Tabel 1. Variabel Penyediaan Taman Kota |  |
|-----------------------------------------|--|
| Variabel                                |  |
| Regulasi Penyediaan RTH                 |  |
| Ketersediaan Anggaran                   |  |
| Partisipasi Masyarakat                  |  |
| Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan   |  |
| Komitmen Pemerintah                     |  |
| Ketersediaan Lahan                      |  |

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kota Bekasi dengan luas wilayah sebesar 213,12 km<sup>2</sup> atau 21.312 ha. Kota Bekasi terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Pemilihan kota Bekasi sebagai lokasi penelitian didasarkan atas justifikasi bahwa Kota Bekasi termasuk dalam kota dengan persentase lahan terbangun tinggi (>42%) bersamaan dengan kota-kota lainnya, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Cirebon (Sitorus *et al.*, 2012). Hal tersebut dinyatakan melalui tingginya angka kepadatan penduduk sehingga mendorong ruang-ruang alami untuk berubah fungsi. Peta lokasi penelitian Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

#### 3.2 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang merupakan metode untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan (Patton, 1990) dengan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini diawali dengan pengkajian literatur berdasarkan fenomena dan isu mengenai penyediaan ruang terbuka hijau publik perkotaan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Hasil sintesis berupa teori berupa aspek penyediaan taman kota dijadikan acuan dalam melakukan wawancara serta kuesioner terhadap responden berupa para ahli sehingga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan taman kota di Kota Bekasi.

### 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Teknik observasi lapangan dilakukan secara langsung untuk mengetahui sebaran dan kondisi eksisting taman kota. Sementara itu, teknik wawancara digunakan untuk mencari data terkait upaya eksisting penyediaan RTH publik taman kota di Kota Bekasi melalui variabel aspek yang dihasilkan dari sintesis teori. Teknik kuesioner bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor berpengaruh terhadap penyediaan taman kota di Kota Bekasi melalui responden berupa para ahli atau *stakeholder* yang sudah ditentukan.



Gambar 2. Pemetaan *Stakeholder* Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan dalam Penyediaan Taman Kota di Kota Bekasi

Tabel 2. Daftar Jumlah Responden Kuesioner

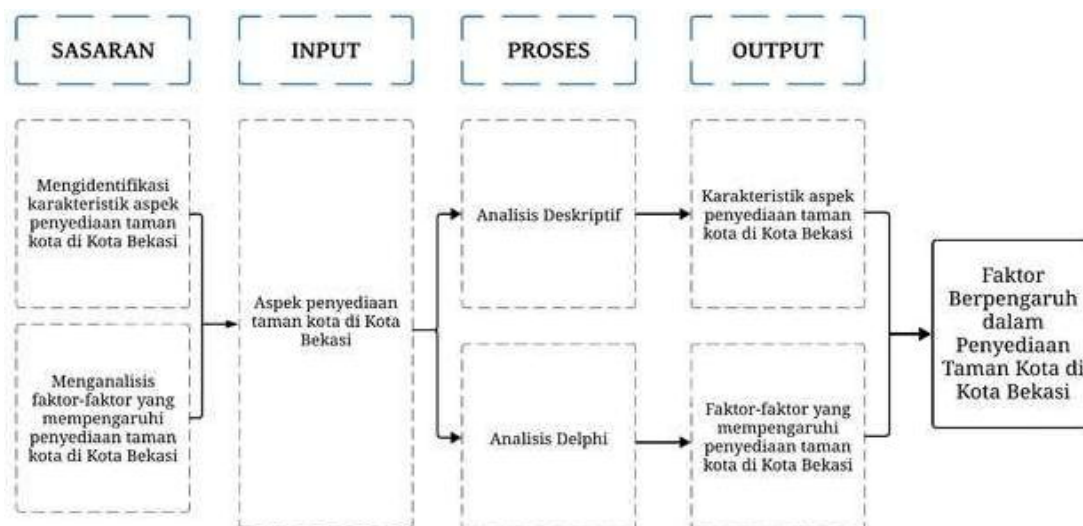
| <i>Stakeholder</i>                                               | Jumlah | <i>Stakeholder Kunci</i>                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Tata Ruang                                                 | 1      | Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama - Bidang Pengendalian Ruang                                       |
| Dinas Lingkungan Hidup                                           | 1      | Analisis Lingkungan Hidup - Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup          |
| Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air                             | 1      | Kepala UPTD Pertamanan Wilayah II - Bidang Prasarana Jalan                                             |
| Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah | 1      | Kasubid Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |

Pada penelitian ini, metode sampling yang diterapkan adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Stakeholder* yang dipilih merupakan kelompok *stakeholder* yang memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sekaligus pengambil keputusan dan pelaksana yang memadai terkait penyediaan RTH publik taman kota di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil matriks pemetaan *stakeholder* pada Gambar 2, maka dihasilkan kelompok *stakeholder* yang dipilih, yaitu kelompok *key player* dan *context setter*. Total *stakeholder* yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 ahli/expert yang didasari oleh tupoksi masing-masing *stakeholder* yang diuraikan pada Tabel 2.

### 3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan Delphi. Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk menghasilkan karakteristik aspek penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Sementara teknik analisis Delphi digunakan untuk mengidentifikasi dan menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Pada penelitian ini, proses analisis Delphi berlangsung dengan serangkaian iterasi hingga mencapai konsensus. Tahapan alur analisis Delphi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menentukan responden melalui analisis *stakeholder*. Melalui identifikasi kepentingan dan pengaruh *stakeholder* terhadap penyediaan RTH publik di Kota Bekasi, dihasilkan empat *stakeholder* yang akan menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Selanjutnya, dilakukan distribusi kuesioner responden. Pengisian kuesioner dilakukan secara bertahap oleh keempat responden. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan ketika proses pengambilan data berlangsung. Terakhir adalah reduksi dan tampilan data hasil kuesioner. Hasil dari kuesioner berupa jawaban dari seluruh responden akan dianalisis menggunakan statistik untuk melihat konvergensi atau konsensus. Hal ini merupakan hasil akhir dari metode Delphi.

Setelah dilakukan pengumpulan data kuesioner kepada para *stakeholder* ahli, dilakukan perhitungan statistik untuk mengukur nilai konsensus dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 (1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). Melalui pengukuran ini, maka hasil akan diketahui dari nilai standar deviasi, *interquartile range* (IR) dan median. Analisis Delphi kemudian dapat disimpulkan konsensus dengan kriteria ketentuan nilai standar deviasi sebesar  $\leq 1$  dan nilai IR juga sebesar  $\leq 1$  serta nilai median sebesar  $\geq 4$ . Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka hasil iterasi dinyatakan tidak konsensus dan dilakukan pengulangan iterasi. Kerangka analisis yang menjelaskan penelitian dapat diketahui pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Analisis Penelitian

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

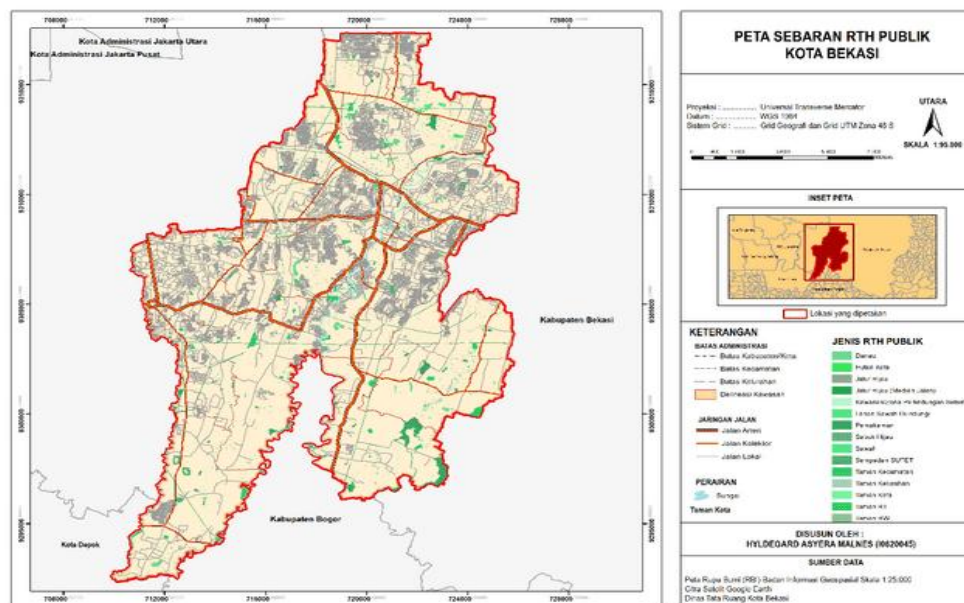
##### 4.2 GAMBARAN UMUM KETERSEDIAAN RTH PUBLIK TAMAN KOTA DI KOTA BEKASI

Persebaran RTH publik di Kota Bekasi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang menunjukkan luas sebesar 1754,7842 ha pada Tabel 3. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bekasi sebesar 21.312 ha, maka persentase luasan RTH publik di Kota Bekasi sebesar 8,23% dari total luas wilayahnya. Hal ini menunjukkan masih minimnya penyediaan RTH publik Kota Bekasi dari minimal 30% ruang terbuka hijau menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebaran RTH publik di Kota Bekasi ditunjukkan pada Gambar 4. Beberapa taman kota yang ada di Kota Bekasi di antaranya adalah Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, Taman Alun-Alun M. Hasibuan, Danau Duta Harapan, Taman Edukasi Perwira, dan Taman Kemang Ifi Graha. Taman-taman kota tersebut tersebar pada sejumlah kecamatan di Kota Bekasi, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.

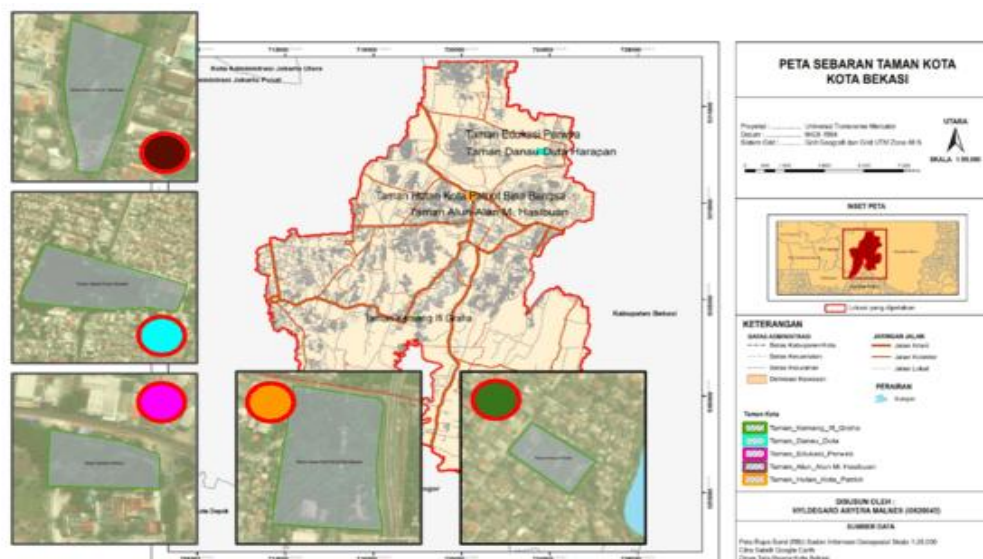
Tabel 3. Tipologi RTH Publik Eksisting Kota Bekasi

| Jenis RTH                          | Luas                      |
|------------------------------------|---------------------------|
| Taman RT                           | 1.103.022                 |
| Taman RW                           | 689.432                   |
| Taman Kelurahan                    | 840.571                   |
| Taman Kecamatan                    | 1.883.993                 |
| Taman Kota                         | 2.364.620                 |
| Sungai                             | 1.275.697                 |
| Danau                              | 588.572                   |
| Hutan Kota                         | 108.644                   |
| Sempadan SUTET                     | 1.734.671                 |
| Lahan Sawah Dilindungi             | 297.008                   |
| Sabuk Hijau                        | 323.983                   |
| Pemukaman                          | 2.055.507                 |
| Kawasan/Zona Perlindungan Setempat | 4.491.070                 |
| Jalur Hijau (Median Jalan)         | 84.402                    |
| Jalur Hijau                        | 1.141.276                 |
| Total Luas                         | 17.547.842 m <sup>2</sup> |

Sumber: (Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, 2024)



Gambar 4. Peta Persebaran RTH Publik Kota Bekasi



Gambar 5. Peta Persebaran Taman Kota di Kota Bekasi

## 4.2 KARAKTERISTIK ASPEK PENYEDIAAN TAMAN KOTA DI KOTA BEKASI

Aspek penyediaan taman kota di Bekasi meliputi regulasi penyediaan RTH, ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, koordinasi antar pemangku kepentingan, komitmen pemerintah, dan ketersediaan lahan. Pada regulasi Penyediaan RTH Kota Bekasi terdapat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Taman serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi. Pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi tentang Pengelolaan Taman tersebut, terdapat sejumlah aturan dan ketentuan yang membahas mengenai proses pelaksanaan penataan taman kota di Kota Bekasi yang meliputi pembangunan taman kota, pemanfaatan taman kota, dan pengamanan taman kota. Perda ini menjelaskan pengelolaan taman yang diwujudkan dengan penetapan Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Tapak Besmen (KTB) pada RTH privat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kota. Selain itu, terdapat larangan bagi setiap warga agar tidak menebang atau merusak pohon dan memindahkan sarana dan prasarana taman kota tanpa izin pihak yang berwenang. RTRW Kota Bekasi memuat ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Kota yang terdiri atas kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. Kebijakan yang Menunjang Penyediaan RTH Taman Kota di Kota Bekasi ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Kebijakan yang Menunjang Penyediaan RTH Taman Kota di Kota Bekasi**

| <b>Peraturan Daerah</b>                                                    | <b>Diktum Terkait RTH Taman Kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Taman | <p>Pelaksanaan penataan Taman Kota oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara sistematis dan terpadu melalui Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing</p> <p>Pelaksanaan penataan Taman Kota tersebut meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Taman Kota;</li> <li>• Pemanfaatan Taman Kota;</li> <li>• Pengamanan Taman Kota;</li> <li>• Pembangunan Taman Kota, berupa upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas Taman Kota dalam rangka mewujudkan pemenuhan taman kota;</li> <li>• Pemanfaatan Taman Kota, berupa upaya peningkatan daya guna dan hasil guna Taman Kota;</li> <li>• Pengamanan Taman Kota, berupa upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas Taman Kota agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.</li> </ul> <p>Pembangunan Taman Kota meliputi taman publik dan taman privat. Taman publik meliputi taman-taman di perkantoran pemerintah dan taman-taman di ruang publik, sementara taman privat meliputi taman rumah tinggal, taman perkantoran, pusat perbelanjaan, industri dan bangunan.</p> <p>Pengelolaan Taman Kota diwujudkan dengan ditetapkannya KDH, KDB, KLB, dan KTB untuk RTH privat dalam RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kota.</p> <p>Setiap warga (orang/badan) dilarang menebang atau merusak pohon, sarana &amp; prasarana taman kota, serta memindahkan sarana dan prasarana taman kota tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang: perwujudan RTH kota sebesar 20% RTH publik dan 10% untuk RTH privat dari luas wilayah daerah;</p> <p>Strategi perwujudan RTH kota sebesar 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat dari luas Wilayah Daerah salah satunya dengan penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, dan fungsi tertentu</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Kota terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu RTH dan jaringan utilitas</li> <li>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH</li> <li>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota</li> <li>d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 10%;</li> <li>b) KLB maksimal 0,2; dan</li> <li>c) koefisien dasar hijau minimal 80%</li> <li>d) ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kota.</li> </ol> </li> </ol> |
| Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Pendanaan dalam penyediaan RTH taman kota di Kota Bekasi digunakan untuk realisasi yang meliputi perencanaan, penyediaan lahan, pembangunan, dan pengelolaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi, sebagian besar sumber pendanaan untuk penyelenggaraan taman kota berasal dari anggaran APBD. Hal ini menunjukkan bahwa APBD menjadi sumber utama pendanaan untuk proyek-proyek publik tingkat daerah termasuk di dalamnya penyediaan RTH. Anggaran yang dialokasikan untuk taman kota dalam APBD Kota Bekasi merupakan alokasi untuk pembiayaan program yang berkaitan.

Partisipasi masyarakat di Kota Bekasi dalam penyediaan taman kota dilaksanakan dalam beberapa bentuk pada berbagai tingkatan mulai dari perencanaan atau pengambilan keputusan hingga pengawasan. Menurut hasil wawancara kepada salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi, partisipasi masyarakat oleh badan usaha sebagian besar berbentuk kepatuhan terhadap perizinan pembangunan dengan menyediakan sebagian lahannya untuk dijadikan ruang terbuka atau area hijau. Kemudian pada proses perencanaan, partisipasi masyarakat juga terlihat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pada Musrenbang ini, perwakilan masyarakat Kota Bekasi berperan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan terkait taman kota maupun RTH topologi lainnya kepada pemerintah.

Penyediaan taman kota di Kota Bekasi melibatkan berbagai *stakeholder* dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Sejalan dengan penelitian Nugroho *at al.* (2014), *stakeholder* terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. *Policy creator* merupakan *stakeholder* pembuat kebijakan yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan yakni seluruh OPD terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta lainnya yang merupakan pihak Pemerintah Daerah yang membuat regulasi terkait penyediaan dan pengelolaan RTH publik taman kota di Kota Bekasi. Fasilitator dalam penyediaan RTH publik taman kota ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada masyarakat agar terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan RTH. Koordinator dalam kasus ini yakni Badan Bappelitbangda Kota Bekasi yang berperan sebagai pihak yang menghubungkan dan memfasilitasi kerja sama antar *stakeholder* terkait penyediaan RTH taman kota sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021. *Implementer* dalam hal ini berupa masyarakat beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan taman kota. Akselerator dalam hal ini merupakan sektor swasta yang berperan dalam mendukung percepatan pembangunan RTH melalui pendanaan atau teknologi inovatif. Dengan menawarkan insentif, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk lebih aktif dalam menciptakan dan memelihara ruang hijau sementara dengan penerapan disinsentif pemerintah dapat mencegah tindakan yang merugikan keberadaan RTH dan memastikan bahwa pihak pengembang memenuhi tanggung jawabnya untuk turut dalam menjaga keseimbangan lingkungan.



**Gambar 5. Kerjasama Pemangku Kepentingan dalam Penyediaan RTH**

Sumber: (Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022)

Bentuk komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam penyediaan taman kota mencakup berbagai langkah strategis dan operasional yang dapat diambil untuk memastikan bahwa taman kota telah tersedia dan terkelola dengan baik. Hal ini salah satunya terdapat pada dokumen Perubahan RKPd Kota Bekasi tahun 2023 yang menjelaskan bahwa arah kebijakan strategis Kota Bekasi membahas terkait penataan kawasan ruang publik dan permukiman serta taman/hutan kota sebagai salah satu bentuk program dalam hal peningkatan kualitas ruang terbuka (penataan kawasan) publik. Pada kondisi eksisting, Pemerintah Kota telah membuat beberapa sarana prasarana publik untuk dinikmati masyarakat, misalnya pada Taman Kota Alun-Alun Kota Bekasi telah disediakan tempat bermain anak-anak serta area dengan jaringan koneksi WIFI (Cahyo *at al.*, 2017).

Penggunaan lahan di Kota Bekasi didominasi oleh bangunan permukiman. Penggunaan lahan dilihat berdasarkan pembagian Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kota Bekasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, yakni terdapat lima zona, yaitu BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustika Jaya, dan BWP Jatisampurna. Hasil analisis tingkat kepadatan penduduk yang dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah pada zona BWP di Kota Bekasi, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk terbesar terdapat pada zona BWP Pusat Kota dan terendah terdapat pada BWP Jatisampurna. Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut SNI 03-1733-2004, maka BWP Pusat Kota tergolong dalam klasifikasi kepadatan sedang sementara BWP lainnya tergolong dalam klasifikasi rendah dengan angka kurang dari 150 jiwa/ha.

#### 4.3 FAKTOR BERPENGARUH DALAM PENYEDIAAN TAMAN KOTA DI KOTA BEKASI

Penelitian ini menggunakan metode analisis Delphi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Penelitian oleh Pfendtner-Heise *at al.* (2024) menggunakan pendekatan Delphi untuk mengevaluasi dan mengukur dalam perencanaan penelitian multidisiplin yang menekankan pentingnya mengoperasionalkan konvergensi pemahaman di antara para responden sebagai hasil utama sehingga dapat dipahami

secara efektif dalam proyek-proyek kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penentuan faktor-faktor penyediaan taman kota di Kota Bekasi dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada responden yang telah ditentukan dengan beberapa langkah iterasi yang terbagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama metode analisis Delphi ini dilakukan dengan kuesioner terbuka berupa pertanyaan semi terstruktur. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan persetujuan faktor-faktor yang telah didapatkan berdasarkan hasil sintesis teori. Hasil iterasi Delphi tahap pertama ditunjukkan Tabel 5.

**Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Iterasi Delphi Tahap Pertama**

| Faktor                                | R1 | R2               | R3 | R4 |
|---------------------------------------|----|------------------|----|----|
| Regulasi Penyediaan RTH               | S  | S                | S  | S  |
| Ketersediaan Anggaran                 | S  | S                | S  | S  |
| Partisipasi Masyarakat                | S  | S                | S  | S  |
| Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan | S  | S                | S  | S  |
| Komitmen Pemerintah                   | S  | S                | S  | S  |
| Ketersediaan Lahan                    | S  | S                | S  | S  |
| Iklim/Cuaca (faktor baru)             |    | Diajukan oleh R2 |    |    |
| Kualitas SDM Aparatur (faktor baru)   |    | Diajukan oleh R3 |    |    |

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner pada iterasi tahap pertama, terdapat 6 faktor yang telah disetujui yaitu Regulasi Penyediaan RTH, Ketersediaan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan, Komitmen Pemerintah, dan Ketersediaan Lahan. Pada kuesioner Delphi tahap pertama ini, ditemukan juga faktor baru yakni Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Iklim/Cuaca. Faktor tersebut selanjutnya akan dilakukan eksplorasi kembali di tahap berikutnya hingga mendapat persetujuan dari seluruh responden. Tahap kedua bertujuan untuk mengukur persetujuan faktor-faktor terpilih dan mengkonfirmasi faktor-faktor baru yang telah diajukan pada iterasi pertama sebelumnya. Hasil iterasi Delphi tahap kedua dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Rekapitulasi Persetujuan Faktor Baru Hasil Iterasi Delphi Tahap Kedua**

| Faktor                | R1 | R2 | R3 | R4 |
|-----------------------|----|----|----|----|
| Kualitas SDM Aparatur | TS | S  | S  | TS |
| Iklim/Cuaca           | S  | S  | S  | S  |

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner pada iterasi tahap kedua, seluruh responden sepakat untuk menyetujui faktor iklim/cuaca menjadi faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik Kota Bekasi, yang ditunjukkan dengan jawaban 'setuju' oleh keempat responden. Sementara pada faktor Kualitas SDM Aparatur, 2 dari 4 responden tidak menyetujui faktor tersebut, sehingga perlu dilakukan pengulangan kembali pada kuesioner tahap selanjutnya. Tahap terakhir bertujuan untuk mendapatkan persetujuan kembali faktor yang belum konsensus untuk kemudian dilakukan perhitungan uji statistik sehingga mencapai konsensus. Faktor yang akan diajukan yakni faktor Kualitas SDM Aparatur. Hasil persetujuan faktor iterasi tahap ketiga dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Rekapitulasi Persetujuan Faktor Baru Hasil Iterasi Delphi Tahap Ketiga**

| Responden | Faktor Kualitas SDM Aparatur |       |
|-----------|------------------------------|-------|
|           | Hasil                        | Nilai |
| R1        | S                            | 4     |
| R2        | S                            | 5     |
| R3        | S                            | 5     |
| R4        | S                            | 4     |

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa untuk faktor Kualitas SDM Aparatur sudah mencapai konsensus, yang ditunjukkan dengan persetujuan seluruh responden. Selanjutnya dilakukan perhitungan uji konsensus secara statistik menggunakan perangkat lunak pengolahan data statistik dengan melihat kesesuaiannya sesuai syarat pada metode teknik analisis data. Tabel 8 menunjukkan seluruh variabel faktor yang telah mencapai konsensus melalui uji statistik deskriptif dengan perangkat lunak pengolahan data statistik sehingga dihasilkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik studi kasus Taman Kota di Kota Bekasi adalah regulasi penyediaan RTH, ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, koordinasi antar pemangku kepentingan, komitmen pemerintah, ketersediaan lahan, dan kualitas SDM aparatur dan iklim/cuaca.

Pada analisis Delphi, dihasilkan persetujuan oleh para responden terhadap faktor regulasi penyediaan RTH untuk menjadi faktor yang mempengaruhi penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi, telah terdapat dua regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan taman kota, yakni Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Taman serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi. Tersedianya

kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor yang mendukung penyediaan RTH taman kota. Ketersediaan kebijakan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan taman kota serta secara tidak langsung meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya sebagai sarana untuk mencerminkan identitas daerah.

**Tabel 8. Perhitungan Uji Statistik Deskriptif**

| Variabel Faktor                       | R1 | R2 | R3 | R4 | Mean | Median | IQR  | Std. Deviasi | Evaluasi |              |
|---------------------------------------|----|----|----|----|------|--------|------|--------------|----------|--------------|
|                                       |    |    |    |    |      |        |      |              | IQR      | Std. Deviasi |
| Regulasi Penyediaan RTH               | 5  | 4  | 5  | 5  | 4,75 | 5      | 0,75 | 0,5          | Kon      | Kon          |
| Ketersediaan Anggaran                 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5    | 5      | 0    | 0            | Kon      | Kon          |
| Partisipasi Masyarakat                | 5  | 5  | 4  | 5  | 4,75 | 5      | 0,75 | 0,5          | Kon      | Kon          |
| Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan | 5  | 4  | 4  | 5  | 4,5  | 4,5    | 1    | 0,57         | Kon      | Kon          |
| Komitmen Pemerintah                   | 5  | 4  | 5  | 5  | 4,75 | 5      | 0,75 | 0,5          | Kon      | Kon          |
| Ketersediaan Lahan                    | 5  | 4  | 4  | 5  | 4,5  | 4,5    | 1    | 0,57         | Kon      | Kon          |
| Iklim/Cuaca                           | 5  | 5  | 5  | 4  | 4,75 | 5      | 0,75 | 0,5          | Kon      | Kon          |
| Kualitas SDM Aparatur                 | 4  | 5  | 5  | 4  | 4,25 | 4,5    | 1    | 0,95         | Kon      | Kon          |

Pendanaan merupakan aspek penting dalam perencanaan taman kota yang bertujuan untuk menjamin penyediaan fungsi dan bentuk RTH yang berkualitas. Pada analisis Delphi, dihasilkan persetujuan oleh para responden terhadap faktor ketersediaan anggaran untuk menjadi faktor yang mempengaruhi penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Pendanaan yang memadai akan mendukung keberlanjutan operasional, pemeliharaan dan pengembangan RTH (Syahrial *at al.*, 2023). Belum optimalnya pengadaan kerja sama dengan pihak swasta di Kota Bekasi secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan anggaran penyediaan taman kota. Penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bersamaan dengan alokasi pendanaan strategis untuk berbagai proyek berwawasan lingkungan berperan penting dalam memperkuat jejak ekologi sebuah perusahaan. Strategi ini selain dapat meningkatkan efektivitas lingkungan juga dapat mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Guang-Wen & Siddik, 2022) sehingga ketersediaan anggaran untuk realisasi penyediaan taman kota yang meliputi proses perencanaan, penyediaan lahan, pembangunan, dan pengelolaan dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Di Kota Bekasi, partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya RTH. Sebagian besar kelompok badan usaha di Kota Bekasi berpartisipasi dalam bentuk kepatuhan terhadap perizinan pembangunan dengan menyediakan lahannya untuk dijadikan area hijau. Sementara dalam proses perencanaan taman kota, masyarakat berperan atas keikutsertaannya pada Musrenbang yang dilaksanakan pemerintah. Pentingnya peran masyarakat, baik perseorangan maupun badan usaha, dalam perencanaan dan penyediaan taman kota tidak hanya untuk memastikan kuantitas RTH taman kota, melainkan juga kualitasnya sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan kebermanfaatan jangka panjang.

Pada analisis Delphi, dihasilkan persetujuan oleh para responden terhadap faktor partisipasi masyarakat untuk menjadi faktor yang mempengaruhi penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Cara pandang yang berbeda dari berbagai pihak yang terlibat akan menghasilkan rencana-rencana yang berbeda pula untuk ruang hijau perkotaan (Wagner *at al.*, 2019). Koordinasi yang baik dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal sehingga penyediaan taman kota dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dari sisi kepentingan yang beragam, koordinasi yang baik dapat menghasilkan titik temu dari berbagai kepentingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Selain itu, koordinasi yang baik juga dapat mendorong penyediaan taman kota untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Belum optimalnya realisasi program penyediaan taman kota oleh Pemerintah Kota Bekasi dipengaruhi oleh komitmen pemerintah yang berwenang. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang sudah berjalan sehingga dapat diidentifikasi faktor yang menghambat pencapaian target. Selain itu, pemanfaatan teknologi, penegakan peraturan yang tegas, dan evaluasi berkala juga dapat menjadi bentuk strategi pemerintah dalam berkomitmen terhadap penyediaan taman kota.

Keterbatasan lahan salah satunya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan lahan untuk pembangunan menjadi semakin terbatas akibat meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi densitas penduduk, semakin besar pula tekanan terhadap ketersediaan lahan yang berujung pada degradasi lingkungan

(Dita & Legowo, 2022). Keterbatasan lahan RTH merupakan permasalahan kompleks yang menuntut komitmen kuat dari Pemerintah Kota. Meskipun demikian, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan lestari. Iklim memiliki peran yang signifikan terhadap penyediaan dan pengelolaan RTH. Penyediaan taman kota sebagai RTH berkontribusi dalam menciptakan iklim mikro perkotaan yakni menurunkan suhu udara perkotaan atau mengurangi dampak negatif fenomena *Urban Heat Island* (UHI).

Berdasarkan hasil analisis Delphi yang telah dilakukan, dihasilkan persetujuan oleh para responden terhadap faktor kualitas SDM aparatur untuk menjadi faktor yang mempengaruhi penyediaan taman kota di Kota Bekasi. Pentingnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan perwujudan dari kebutuhan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Selly & Madubun, 2023). Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu melakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap program-programnya, seperti penyediaan taman kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 5. KESIMPULAN

Penyediaan taman kota di Kota Bekasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yakni regulasi penyediaan RTH, ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, koordinasi antar pemangku kepentingan, komitmen pemerintah, ketersediaan lahan, iklim/cuaca, dan kualitas SDM aparatur. Belum terpenuhinya target penyediaan taman kota sebagai bagian dari RTH publik di Kota Bekasi salah satunya dipengaruhi oleh belum kuatnya regulasi yang membahas mengenai perencanaan penyediaan taman kota. Alokasi anggaran penyediaan taman kota bersumber dari APBD maupun APBN. Di sisi lain, kerja sama dengan badan usaha (KPBUs) serta pihak swasta melalui CSR belum optimal. Partisipasi masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya RTH. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang baik dalam penyediaan taman kota dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal dan mendorong penyediaan taman kota untuk terus beradaptasi sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Komitmen pemerintah yang tinggi diperlukan dalam pemenuhan proporsi RTH agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyediaan taman kota sebagai RTH publik adalah salah satu komponen penting dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan bahwa ruang perkotaan telah dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan masyarakat sebagai responden sehingga lebih komprehensif. Penelitian ini hanya berfokus pada jenis RTH publik taman kota sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji atau membahas mengenai detail arahan penyediaan RTH publik di Kota Bekasi pada tiap tipologi jenis RTH.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah membantu serta memberikan izin dan informasi penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, C. (2016). Public Space and the New Urban Agenda. *The Journal of Public Space*, 1(1), 5–10. <https://doi.org/10.5204/jps.v1i1.4>
- Buttin, J. (1989). *Our Common Future. By World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Cahya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1), 1–9.
- Cahyo, R. D., Susanti, M. H., & Sunarto. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 200–207.
- Cullingworth, J. B. (1997). British Land-Use Planning: A Failure to Cope with Change. *Urban Studies*, 34(5–6), 945–960. <https://doi.org/10.1080/0042098975907>
- De Haas, W., Hassink, J., & Stuiver, M. (2021). The Role of Urban Green Space in Promoting Inclusion: Experiences From the Netherlands. *Frontiers in Environmental Science*, 9, 1–11. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.618198>
- Dita, C. Y. E., & Legowo, M. (2022). Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/34>
- Dominggus, Madu, M. I., & Dimmera, B. G. (2023). Pengelolaan Taman Kota dan Penanggulangan Sampah di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.61696/jurdian.v3i2.120>
- Du, X., & Huang, Z. (2017). Ecological and environmental effects of land use change in rapid urbanization: The case of hangzhou, China. *Ecological Indicators*, 81, 243–251. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.040>
- Guang-Wen, Z., & Siddik, A. B. (2022). Do Corporate Social Responsibility Practices and Green Finance Dimensions Determine

- Environmental Performance? An Empirical Study on Bangladeshi Banking Institutions. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.890096>
- Haaland, C., & Bosch, C. K. van den. (2015). Challenges and Strategies for Urban Green-Space Planning in Cities Undergoing Densification: A Review. *Urban Forestry & Urban Greening*, 14(4), 760–771. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.07.009>
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Ruang*, 1(3), 101–110.
- Kaplan, G. (2019). Evaluating the Roles of Green and Built-Up Areas in Reducing a Surface Urban Heat Island Using Remote Sensing Data. *Urbani Izziv*, 30(2), 105–112. <https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2019-30-02-004>
- Lestari, A., & Nur, A. C. (2021). Evaluation of Green Open Space (RTH) Policy in Makassar City. *Jurnal Aktor*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.26858/aktor.v1i1.24333>
- Mou, N., Wang, J., Zheng, Y., Zhang, L., Makkonen, T., Yang, T., & Niu, J. (2023). Flowers as Attractions in Urban Parks: Evidence from Social Media Data. *Urban Forestry & Urban Greening*, 82, 127874. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127874>
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nd ed.). Sage Publication, Inc.
- Pfendtner-Heise, J., Schwenck, A. A. C., Lang, D. J., & Wehrden, H. von. (2024). Making Mutual Learning Tangible: Mixed-Method Delphi as a Tool for Measuring the Convergence of Participants' Reciprocal Understanding in Transdisciplinary Processes. *Futures*, 159, 103365. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103365>
- Rasyid, Y., & Purbaningrum, D. G. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 91–108. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.91-108>
- Selly, R. N., & Madubun, H. (2023). Strategi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 213–224.
- Sitorus, S. R. P., Leonataris, C., & Panuju, D. R. (2012). Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 14(1), 21–28.
- Syahrial, I., Amirulloh, M. R., & Purwanti, D. (2023). Evaluasi Kebijakan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi (Studi Kasus di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 416–438.
- Wagner, M., Mager, C., Schmidt, N., Kiese, N., & Growe, A. (2019). Conflicts about Urban Green Spaces in Metropolitan Areas under Conditions of Climate Change: A Multidisciplinary Analysis of Stakeholders' Perceptions of Planning Processes. *Urban Science*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.3390/urbansci3010015>
- Widyahantari, R., & Rudiarto, I. (2018). Kapasitas Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Taman Tematik guna Mewujudkan Kota Layak Huni. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 9–16. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.9-16>
- Wolff, M., & Haase, D. (2019). Mediating Sustainability and Liveability—Turning Points of Green Space Supply in European Cities. *Frontiers in Environmental Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00061>
- Xu, C., Haase, D., Pribadi, D. O., & Pauleit, S. (2018). Spatial Variation of Green Space Equity and its Relation with Urban Dynamics: A Case study in the Region of Munich. *Ecological Indicators*, 93, 512–523. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.024>
- Zhang, J., Yue, W., Fan, P., & Gao, J. (2021). Measuring the Accessibility of Public Green Spaces in Urban Areas Using Web Map Services. *Applied Geography*, 126, 102381. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102381>